

#2024
KKP BEYOND



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II
2024



BALAI KIPM ENTIKONG



BKIPMENTIKONG



BKIPM_ENTIKONG



BKIPM ENTIKONG



kcp.go.id/bkipmentikong



BALAI KIPM ENTIKONG



BKIPMEntikong



BKIPM_Entikong



BKIPM Entikong



kcp.go.id/bkipmentikong



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong (LKj BKIPM Entikong) Triwulan II Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini menggambarkan capaian kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam menyelenggarakan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dan disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja BKIPM Entikong di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.



Entikong, 9 Juli 2024
Plt. Kepala Balai KIPM Entikong,

Jawawi

**LAPORAN KINERJA
BALAI KIPM ENTIKONG
TRI WULAN II TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KIPM ENTIKONG
2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong (LKj BKIPM Entikong) Triwulan II Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini menggambarkan capaian kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam menyelenggarakan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dan disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja BKIPM Entikong di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Entikong, 9 Juli 2024
Pit. Kepala Balai KIPM Entikong,

Jawawi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong mempunyai 3 Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Awal Tahun 2024. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BKIPM Entikong 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Indikator Kinerja pada tahun 2024 telah banyak mengalami penyesuaian nomenklatur dan target, bila dibandingkan nomenklatur Indikator Kinerja dan Target yang tercantum dalam Keputusan Kepala BKIPM nomor KEP.44/BKIPM/2020 tentang Rencana Strategis BKIPM Tahun 2020-2024. Sebagian besar penyesuaian target tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong serta kondisi dinamika nasional.

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 secara keseluruhan termasuk berhasil, dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama tahun 2024 yaitu Triwulan II sebesar 110,96% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Indikator Kinerja yang telah mencapai target pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Dari 13 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, 9 IKU belum ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara tahunan.
- b. Uraian 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu :
 1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong target 84 realisasi 93,85 (111,73%);
 2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Entikong target 81 realisasi 85,21 (105,20%);
 3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong target 80 realisasi 100 (120%);
 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Entikong target 83 realisasi 93,69 (112,88%).

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Balai KIPM Entikong mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Entikong dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Entikong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada Balai KIPM Entikong serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Entikong. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM Entikong mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Entikong menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- a. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;

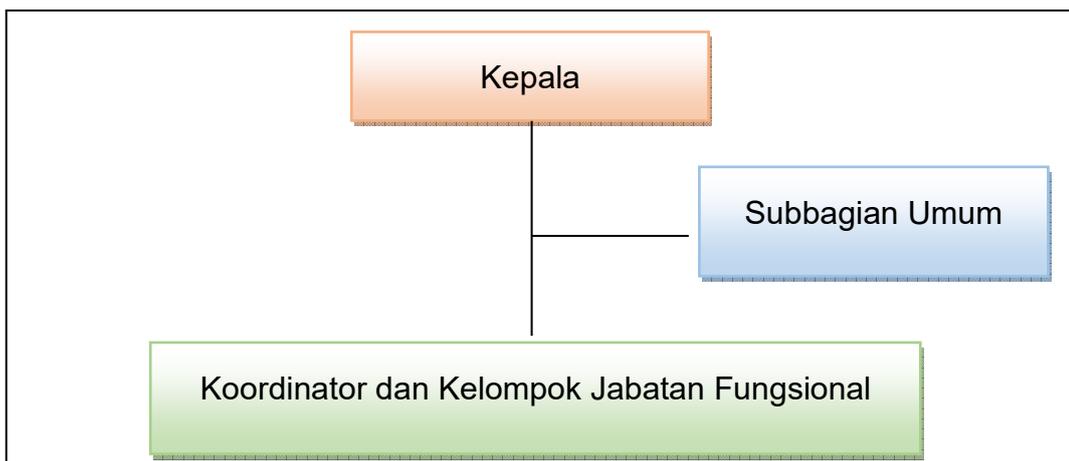
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong merangkap Kepala Subbagian Umum dibantu oleh 8 orang ASN, dan 12 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan PJLP.

Jabatan	Jumlah
Plt. Kepala UPT merangkap Kepala Subbagian Umum	1 orang
Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu	6 orang
Arsiparis Pertama	1 orang
Pranata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	1 orang
PPNPN dan PJLP	12 orang
Jumlah Pegawai	21 orang

Tabel 1. Tabel Kepegawaian BKIPM Entikong

Struktur Organisasi Balai KIPM Entikong



Gambar 1

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong disusun dan dilaksanakan dengan

mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun pangan dan budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional;
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektivitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi public.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup

pengujian.

7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar yang telah disahkan Kepala BKIPM Entikong
- b. Ringkasan Executive
- c. BAB I – Pendahuluan,
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- d. BAB II – Perencanaan Kinerja,
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024;
- e. BAB III – Akuntabilitas Kinerja,
Menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- f. BAB IV – Penutup,
Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- g. BAB V – Lampiran,
Memuat Penetapan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi BKIPM Entikong ditetapkan sesuai dengan Visi BKIPM yang selaras dengan visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”. Maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Terkait dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berangkat dari visi BKIPM maka Balai KIPM Entikong memiliki Visi “Hasil Perikanan Yang Sehat, Aman, Bermutu, Terpercaya Dan Berkelanjutan”.

Hasil perikanan mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Hasil perikanan yang sehat, aman, bermutu, terpercaya dan berkelanjutan mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Berkelanjutan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka Balai

KIPM Entikong sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2, yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai Balai KIPM Entikong dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM antara lain :

1. Meningkatkan peran serta dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai KIPM Entikong

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Entikong Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 2.1. di bawah ini :



Gambar 2
Peta Strategis BKIPM Entikong Tahun 2024

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Entikong Tahun 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Entikong (sertifikat)	5
		2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong (produk)	10
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Entikong (UPI)	7
Kegiatan 1. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong (nilai)	84
		5	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong (%)	74
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Entikong (Indeks)	86
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Entikong	82
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Entikong (%)	100
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Entikong (%)	80
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	82
		12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Entikong (%)	77,5
13	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Entikong (%)	77,5		

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

Program : Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp 3.860.133.000,-

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	134.200.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	472.500.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.253.433.000
Total Anggaran BKIPM Entikong Tahun 2024		3.860.133.000

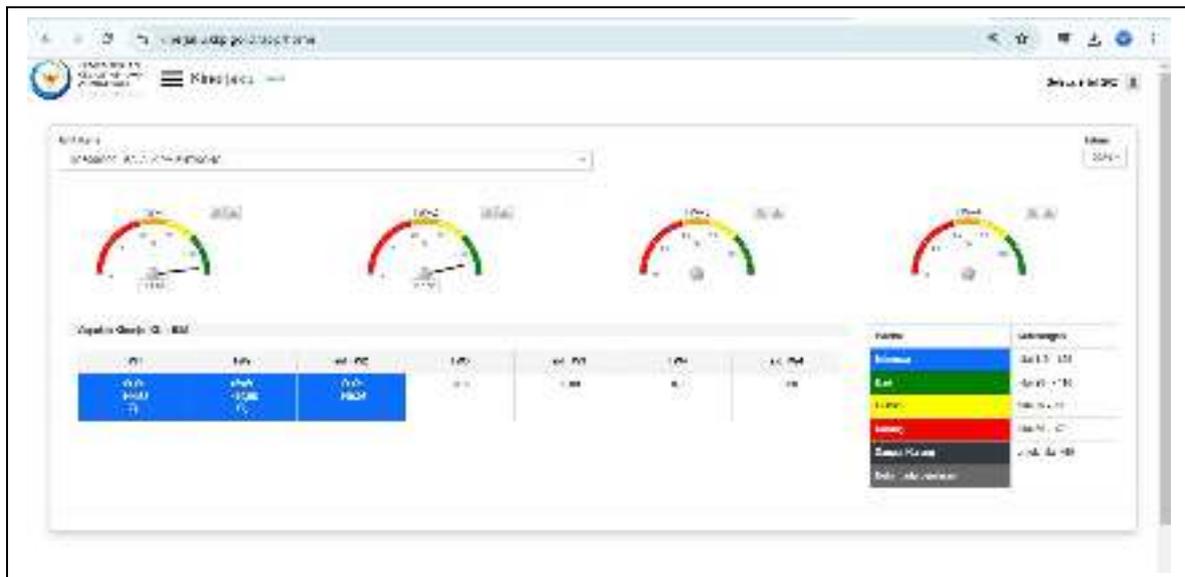
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Triwulan I Tahun 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama Triwulan II tahun 2024 sebesar 110,96% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2024.



Gambar 3

Dashboard Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024 BKIPM Entikong

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan sasaran kinerja secara lebih detail menurut indikator kerjanya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

0		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Entikong (sertifikat)	5	-
		2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong (produk)	10	-
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Entikong (UPI)	7	-
Kegiatan 1. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong (nilai)	84	93,85 (111,73%)
		5	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong (%)	74	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Entikong (Indeks)	81	85,21 (105,20%)
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Entikong	82	-
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Entikong (%)	100	-
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Entikong (%)	80	100 (120%)
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	83	93,69 (112,88%)
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	82	-
		12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Entikong (%)	77,5	-
		13	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Entikong (%)	77,5	-

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) menjadi tolak ukur dari keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Entikong. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup BKIPM Entikong sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2024
1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	0	0
2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong (produk)	0	0
3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	0	0

Tabel 4. Capaian Sasaran Kinerja 1 Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun 2024

IK1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Koompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan hygiene

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit Pengumpul/Supplier dilaksanakan berdasarkan konsep *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Formula perhitungan :

IK9. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan

Formula :

Menghitung Jumlah sertifikat CPIB baru ditambah sertifikat CPIB perpanjangan pada periode tahun berjalan sesuai rumus :

$$S = A + B$$

Ket :

A = Jumlah sertifikat CPIB yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan

B = Jumlah sertifikat CPIB perpanjangan pada periode tahun berjalan

Pada tahun 2024 Balai KIPM Entikong menargetkan 5 sertifikat. Pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada target IK Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan karena target IK Tahunan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-1 Pengendalian Mutu											
IK-1 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
0	7	0	0	0	-	-	5	0	5	5	0

IK2. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada Tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolah ikan yang telah memenuhi Sertifikat penerapan PMMT/ HAACP dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap unit pengolahan ikan. Sertifikat diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, Unit proses dan/atau potensi bahaya (Hazard) yang berbeda yang ditangani dan/ atau diolah oleh UPI Permohonan baru dan perpanjangan sertifikat Hazard:

- ✚ UPI mengajukan permohonan;
- ✚ Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat PM
- ✚ Inspeksi oleh Inspektur Mutu
- ✚ Evaluasi dan rekomendasi tim teknis
- ✚ Penerbitan sertifikat HACCP
- ✚ UPI melakukan tindakan perbaikan
- ✚ Verifikasi tindakan perbaikan oleh inspektur mutu.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 51 Tahun 2018. Sertifikat penerapan HACCP diterbitkan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) berdasarkan jenis olahan, jenis proses atau berdasarkan potensi bahaya (hazard) yang dilakukan proses produksinya oleh UPI.

Formula yang digunakan untuk menghitung Sertifikasi HACCP pada UPI lingkup BKIPM Entikong = **HACCP Perpanjangan + HACCP Baru.**

IK Sertifikat penerapan PMMT/ HAACP pada Tahun 2024 Triwulan II belum terlaksana karena target IK Tahunan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

Tabel 6. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-2 Pengendalian Mutu											
IK-2 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
0	17	0	0	0	0	0	10	0	10	12	0

IK3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan unit usaha yang memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Adapun persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan sistem ketelusuran.

Pelaksanaan kegiatan untuk IK ini dilakukan melalui kegiatan inspeksi PMMT/HACCP dan Monev PPMT/HACCP pada Unit Pengolahan Ikan. Kegiatan inspeksi maupun monev PMMT/HACCP dilakukan terhadap pemenuhan dan penerapan persyaratan teknis produk dan/atau proses pada Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Abalysis and Critical Control Point* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. **Formula perhitungan** : IK 3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Nilai diukur dengan menghitung \sum UPI yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP)

Pada tahun 2024 Balai KIPM Entikong menargetkan 7 UPI. Pada Triwulan II Tahun 2024 target IK UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan perhitungan target IK Tahunan.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-1 Pengendalian Mutu											
IK-3 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
0	8	0	0	0	0	-	7	0	7	6	0

Kegiatan 2. Standardisasi dan Sistem Kepatuhan

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan berasal dari sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, pada tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja 2 Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun 2024 :

No	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2024
1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong (nilai)	84	93,85 (111,73%)
2	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong (%)	0	0

tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja 2 Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun 2024

IK4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Entikong

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat pada website : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

Formula :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \text{Jumlah Bobot} / \text{Jumlah Unsur} = 1 / 9 = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = (\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}) / \text{Total unsur yang terisi}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Tabel 9. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	3,26 - 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan

.Tabel 10.a. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan											
IK-12 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
91,11	92,24	92,40	84	93,85	111,73	1,56%	84	111,73	84	84	111,73

1. Capaian IKU

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Target IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 84. Realisasi IK yaitu 93,85 pada Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai target IK Triwulan II yaitu 84 dan target IK Tahun 2024 terhadap

prosentase target 111,73%. Realisasi IK yaitu 91,11 pada Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai target IK Triwulan II yaitu 84 dan target IK Tahun 2023 terhadap prosentase target 108,46%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Realisasi IK yaitu 93,85 pada Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai target IK Triwulan II yaitu 84 dan target IK Tahun 2024 dengan prosentase capaian target 111,73%. Realisasi IK yaitu 91,11 pada Triwulan II Tahun 2023 telah mencapai target IK Triwulan II yaitu 84 dan target IK Tahun 2023 dengan prosentase capaian target 109,80%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 84. Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 93,84 (111,73%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2020-2024 yaitu 84 di tahun 2024, capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 93,84 (111,73%).

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong efisien karena pengumpulan data kuesioner melalui website <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2024 kualitas pelayanan BKIPM Entikong dipersepsikan "Sangat Baik" oleh masyarakat, hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh total nilai rata-rata dari 9 unsur SKM sebesar 93,85. Unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur Kemudahan Prosedur, dan Layanan Konsultasi. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang tersedia pada kantor pelayanan BKIPM Entikong sudah sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan. Pada unsur Kesesuaian Produk dan Unsur Kecepatan Respon memiliki nilai paling rendah, hal ini dikarenakan sering hilangnya sinyal baik dari provider seluler maupun wifi pada kantor Balai KIPM Entikong sehingga Ketika terdapat keluhan ataupun pertanyaan dari pengguna jasa petugas tidak langsung dapat merespon.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Rincian *Output* [3990.ADD] 001.C Survey Kepuasan Masyarakat yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dianggarkan Rp 2.000.000,-, dan mengalami blokir anggaran sebagai berikut :

Tabel 10.b. **Realisasi Anggaran IK 4 pada Triwulan II Tahun 2024**

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3990.ADD] 001.C Survey Kepuasan Masyarakat	2.000.000	0 (diblokir)	0

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAS)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Triwulan III Tahun 2024, yaitu :

Mengevaluasi jaringan internet agar sinyal stabil sehingga respon petugas menjadi cepat dalam menjawab keluhan ataupun pertanyaan dari pengguna jasa;

IK5. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong

Penilaian dilakukan secara *onsite* maupun *ondesk*. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing- masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

Tabel 11.a. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-2 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan											
IK-5 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
81,33	82,58	-	74	-	-	-	74	-	74	74	-

Pada tahun 2024 Balai KIPM Entikong menargetkan 74. Pada Triwulan I Tahun 2024 target IK Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong perhitungan target IK Tahunan.

Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari sasaran strategis, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM;

Sasaran Strategis 4. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM Entikong diperoleh dari tabel 12. pencapaian indikator sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2024	Realisasi TW II Tahun 2024
1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong (Indeks)	81	85,21
2	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Entikong	0	0
3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Entikong (%)	0	0
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Entikong (%)	80	100 (120%)
5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	0	0
6	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	83	93,69 (112,88%)
7	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Entikong (%)	0	0
8	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Entikong (%)	0	0

tabel 12. Capaian Sasaran Kinerja 3 Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun 2024

IK6. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong yaitu 81 % yang dihitung semesteran bersumber dari website <http://ropeg.kkp.go.id/ip-asn/>.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-6 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
76,43	86,88	0	81	85,21	105,20	-	81	105,20	84	84	101,44

1. Capaian IKU

IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian semesteran. Pada Triwulan II Tahun 2024 IK mencapai target semesteran yaitu 81 dan target tahunan 84, yaitu 85,21. Target IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 84, sehingga target PK, target Renstra BKIPM dan BKIPM Entikong telah tercapai dengan prosentase 101,44%. Sedangkan pada Triwulan II Tahun 2023 target IKU 76 telah meningkat dari target tahun 2022 yaitu 75. Pada Tahun 2023 realisasi IK yaitu 76,43 sehingga target Triwulan II Tahun 2023 telah tercapai dengan prosentase 100,57%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada Triwulan II Tahun 2024 capaian IK yaitu 85,21 sehingga Target Triwulan II Tahun 2024 tercapai dengan prosentase capaian 105,20%. Pada Triwulan II Tahun 2023 realisasi IK yaitu 76,43 sehingga target Triwulan II Tahun 2023 telah tercapai dengan prosentase 100,57%,.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 84. Capaian kinerja Tahun 2024 telah memenuhi target jangka menengah yaitu 101,44%. Pada Triwulan II Tahun 2024 realisasi IK yaitu 85,21 sehingga target PK, target Renstra BKIPM dan BKIPM Entikong telah tercapai dengan prosentase 101,44%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2020-2024 meningkat 84 di tahun 2023, dan konstan 84 pada tahun 2024. Pada Triwulan II Tahun 2024 realisasi IK yaitu 85,21 sehingga target Renstra BKIPM dan BKIPM Entikong 2020-2024 telah tercapai dengan prosentase 101,44%.

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong efisien karena pengumpulan data melalui website Si-ASN BKN dan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/>.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Analisis keberhasilan IK 6 IP ASN lingkup Balai KIPM Entikong yaitu pegawai mengupdate Pendidikan formal, diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat 20 jp dan seminar paada Si-ASN. Kegiatan pendukung yaitu :

- a. Pembuatan *Training Need Analysis*;
- b. Mengusulkan kebutuhan diklat pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- c. Mengikuti webinar dan diklat *online* melalui e-milea.
- d. *Updating* Si-ASN untuk menaikkan IP ASN.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Rincian *Output* [3987.EBC]954 Layanan Manajemen SDM dianggarkan Rp 32.301.000,-, dan [3987.EBA]994.001 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan dianggarkan Rp 1.662.202.000,- sebagai berikut :

Tabel 10.b. Realisasi Anggaran IK 6 pada Triwulan II Tahun 2024

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3987.EBC]954 Layanan Manajemen SDM	32.301.000	15.446.968	47,82
2	[3987.EBA]994.001 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	1.662.202.000	1.085.636.891	65,31

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAS)

8. Rencana Aksi Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Tahun 2024, yaitu :

- a. Membuat *Training Need Analys*;
- b. Mengusulkan kebutuhan diklat pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- c. Mengikuti webinar dan diklat online melalui e-milea.
- d. Melaksanakan updating Si-ASN secara periodic untuk menaikkan IP ASN;
- e. Memantau penginputan target dan capaian SKP ASN.

IK7. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BKIPM Entikong

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 82, namun pada triwulan II 2024 belum ada realisasi karena perhitungan dilakukan tahunan.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-7 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
-	96,98	-	-	-	-	-	82	-	82	83	-

IK8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Entikong

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula :

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2024 =

(Jumlah Penyelesaian Temuan atas laporan keuangan TA. 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan / Realisasi rill tahun 2024) X 100%

Pada tahun 2024 IK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Balai KIPM Entikong penilaian secara tahunan, sehingga target triwulan I 2024 belum ada realisasi.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-8 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-

IK9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan:

- 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan ltjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT
- 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan
- 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan ltjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 80 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa Balai KIPM Entikong pada Triwulan II Tahun 2024 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk perbaikan Kinerja lingkup BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	100	80	100	120	0	80	120	80	80	120

1. Capaian IKU

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan. Pada tahun 2023, IKU telah mencapai target triwulanan dan target tahunan, yaitu 120% dari target triwulanan dan tahunan yaitu 75% dengan realisasi 100%. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong pada Tahun 2024 mencapai 120 % dari target sebesar 80%, dari hasil perhitungan diperoleh capaian tahun 2024 100%. Target IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 80% dengan capaian 100%, sehingga target pada Renstra BKIPM Entikong maupun Renstra BKIPM tercapai.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan II Tahun 2024

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Triwulan II tahun 2023 capaian IKU 100% dan capaian Triwulan II tahun 2024 100%, baik pada Triwulan II tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2024, capaian kinerja telah memenuhi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 80%, sedangkan untuk target tahun 2024 yaitu 80%. Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 yaitu 100% terhadap target jangka menengah 80% yaitu 120 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2020-2024 pada tahun 2024 yaitu 100% dari target 75%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2020-2024 yaitu 80% di tahun 2024, ditargetkan dapat konsisten dengan target 80% pada tahun 2024. Capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 telah memenuhi target Renstra BKIPM Entikong 2020-2024 pada tahun 2024 yaitu 100% dari target 80%.

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

Terdapat efisiensi anggaran dikarenakan audit Itjen telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan telah selesai ditindaklanjuti.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pada Triwulan II tahun 2024 BKIPM Entikong belum ada temuan Itjen KKP. Pemantauan tindak lanjut temuan Itjen dengan 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari belum ada penyerapan anggaran karena pengawasan bersifat intern dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

8. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Triwulan III Tahun 2024, yaitu: segera menyelesaikan tindak lanjut temuan Itjen KKP atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

IK10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada tahun 2024 IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM ditargetkan sebesar 93,76 dengan perhitungan dilakukan per-semester, pada Triwulan II Tahun 2024 target 83 dengan realisasi 93,69.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
95,70	95,62	-	83	93,69	112,88	-	93,76	99,92	93,76	93,76	99,92

1. Capaian IKU

IK Nilai IKPA BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian semester dan tahunan. Pada tahun 2023, Target PK 2023 telah memenuhi target dengan capaian prosentase 107,52%. Pada Tahun 2024 capaian IK 93,69 dari target 83 dengan prosentase 112,88%. Realisasi Tahun 2024 yaitu 93,69 belum mencapai target tahunan 2024 dan target Renstra BKIPM Tahun 2020-2024 yaitu 93,76.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada Triwulan II Tahun 2024 dan tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berjalan. Target IKU Triwulan II Tahun 2024 telah memenuhi target dengan capaian prosentase 112,88% dengan capaian 93,69 dari target IK 83. Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian IK 95,70 dari target 82 dengan prosentase 116,71%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 93,76. Capaian kinerja

tahun 2024 realisasi IKU Nilai IKPA BKIPM Entikong yaitu 93,69, sehingga target target jangka menengah belum tercapai dengan capaian prosentase 99,92%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2020-2024 yaitu 93,76 di tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 realisasi IKU Nilai IKPA BKIPM Entikong yaitu 93,69 belum memenuhi target Renstra BKIPM Entikong 2020-2024.

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Nilai IKPA BKIPM Entikong efisien karena pengumpulan data melalui website SAKTI dan spanin Kemenkeu.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IKU Nilai IKPA BKIPM Entikong nilai aspek kualitas perencanaan anggaran yaitu 96,39. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran 98,90. Nilai aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran 85,92. Berdasarkan ketiga nilai aspek, Nilai aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran perlu ditingkatkan agar Nilai IKPA Balai KIPM Entikong Tahun 2024 dapat memenuhi target.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Rincian *Output* [3987.EBD] 952.051.A Penyusunan Anggaran/RKAKL dianggarkan Rp 28.277.000,-, dan [3987.EBA]994.001 Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan dianggarkan Rp 2.507.776.000,- sebagai berikut :

Tabel 10.b. Realisasi Anggaran IK 10 pada Triwulan II Tahun 2024

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3987.EBC]954 Layanan Manajemen SDM	28.277.000	12.259.081	43,35
2	[3987.EBA]994 Layanan Perkantoran	2.507.776.000	1,596,083,781	63,64

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAS)

8. Rencana Aksi Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Tahun 2024, yaitu :

- a. Realisasi anggaran disesuaikan dengan Rencana Penarikan Dana;
- b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu;
- c. Ketelitian dalam pengajuan SPM;
- d. Pengisian Capaian Output disesuaikan dengan target dan realisasi.

IK11. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Entikong

Adalah Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.

cara Perhitungan :

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Tabel 18. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-11 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
-	86,37	-	-	-	-	-	82	-	82	82	-

Pada tahun 2024 IK Nilai Indikator Kinerja Anggaran lingkup BKIPM Entikong ditargetkan sebesar 82 dengan perhitungan dilakukan tahunan sehingga pada Triwulan II Tahun 2024 belum ada target dan realisasi

IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai

ketentuan yang berlaku.

Formula perhitungan :

IK12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong

Formula :

Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana Umum Pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2024 IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong merupakan IK baru dengan target 77,5 penilaian secara tahunan, sehingga target triwulan II 2024 belum ada realisasi.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-21 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
-	78,26	78,26	-	-	-	-	77,5	-	77,5	77,5	-

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Formula perhitungan :

IK22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 BKIPM ENTIKONG

Formula :

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);

Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada tahun 2024 IK Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong penilaian secara tahunan, sehingga target triwulan I 2024 belum ada realisasi.

Tabel 20. Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan II Tahun 2024

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BKIPM 2020-2024		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2024)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
-	98,50	98,50	-	-	-	-	77,5	-	77,5	77,5	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Entikong Triwulan II Tahun Anggaran 2024 menyajikan Indikator Kinerja yang tercapai dan tidak tercapai pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Terhadap capaian IKU tersebut akan dijadikan bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Entikong yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Dari 13 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, 9 IKU belum ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara tahunan.
2. Uraian 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu :
 1. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong target 84 realisasi 93,85 (111,73%);
 2. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Entikong target 81 realisasi 85,21 (105,20%);
 3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong target 80 realisasi 100 (120%);
 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Entikong target 83 realisasi 93,69 (112,88%)

Perencanaan dan monitoring pencapaian setiap bulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun dan hasil evaluasi dari capaian IKU periode sebelumnya.

4.2. REKOMENDASI

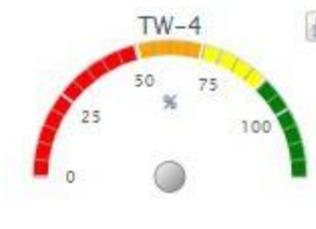
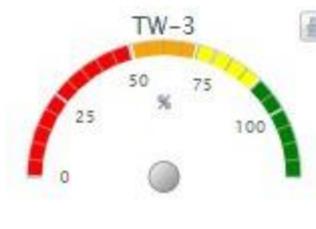
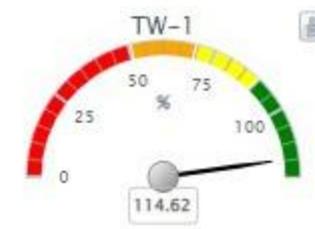
Berdasarkan hasil evaluasi Balai KIPM Entikong pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, sebagai peningkatan kinerja pada periode selanjutnya perlu dilakukan perbaikan, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator yang akan diukur pada periode selanjutnya, agar target tercapai;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan Rencana Aksi BKIPM Entikong yang telah disusun



Unit Kerja: 1026000000 - BALAI KIPM ENTIKONG

Tahun: 2024



Capaian Kinerja IKU + IKM

TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4	s/d TW4
👍👍 114,62 🔍	👍👍 110,96 🔍	👍👍 110,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jawawi**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong

Jawawi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BKIPM Entikong (sertifikat)	5
		2	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Entikong (produk)	10
		3	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Entikong (UPI)	7
Kegiatan 1. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong (nilai)	84
		5	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Entikong (%)	74
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Entikong (Indeks)	86
		7	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Entikong	82
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Entikong (%)	100
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Entikong (%)	80
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	93,76
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Entikong (Nilai)	82
		12	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Entikong (%)	77,5
		13	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Entikong (%)	77,5

Data Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	134.200.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	472.500.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.253.433.000
Total Anggaran BKIPM Entikong Tahun 2024		3.860.133.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

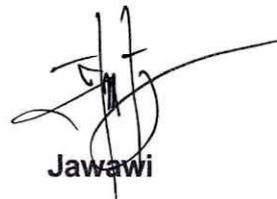
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong



Jawawi



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BPP
MHKP

25TH KKP
SAIL BEYOND
WITH BLUE ECONOMY

#2024
KKP BEYOND

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN II 2024

BALAI KIPM ENTIKONG



BKIPMENTIKONG



BKIPM_Entikong



BKIPM Entikong



kkp.go.id/bkipmentikong



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Balai KIPM Entikong Tahun 2024 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolok ukur tingkat pencapaian sasaran selama Triwulan II atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan publik pada Balai KIPM Entikong. Atas dasar upaya peningkatan kualitas pelayanan, maka unit pelayanan publik pada Balai KIPM Entikong sebagai penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan II Tahun 2024. Hasil dari survei diharapkan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik lingkup Balai KIPM Entikong pada Triwulan II Tahun 2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.



Entikong, 30 Juni 2024
Pit. Kepala Balai KIPM Entikong,

Jawawi, S.Pi
NIP. 19770520 200003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Pengertian Umum.....	2
1.4. Maksud dan Tujuan	4
1.5. Manfaat.....	5
1.6. Hasil yang Diharapkan.....	5
BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN	6
2.1. Ruang Lingkup.....	6
2.2. Tahapan Kegiatan	6
2.2.1. Persiapan	6
2.2.2. Pengumpulan Data	9
2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data	9
2.2.4. Penyusunan Laporan	11
BAB III. HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN	12
3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan.....	12
3.2. Karakteristik Responden.....	14
3.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Umur	14
3.2.2. Responden Berdasarkan Pendidikan.....	15
3.2.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	15
3.3. Saran dan Kritik	16
3.4. Pembahasan.....	16
3.5. Kendala Pengumpulan Data Kuesioner.....	17
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	18
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Saran	18
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Bentuk Nilai Jawaban Terhadap Unsur Pelayanan dalam Survei Kepuasan Masyarakat.....	8
Tabel 2. Nilai Persepsi , Nilai Interval, Nilai Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	11
Tabel 3. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan.....	12
Tabel 4. Hasil Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Hasil Pelaksanaan Survei...	13
Tabel 5. Saran dan Kritik Responden.....	16

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Tahapan Kegiatan.....	6
Gambar 2. Grafik Responden Berdasarkan Umur.....	14
Gambar 5. Grafik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	15
Gambar 6. Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021. tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik nonprofit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan di dirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun layanan.

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang tercantum pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survei berpedoman pada. Selain itu, Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik. Survei ini dapat mengukur sudah sejauh mana kualitas pelayanan penyelenggara layanan publik serta dapat dijadikan referensi dalam melakukan penetapan prioritas perbaikan layanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten

dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara teliti, santun, responsif, akurat dan akuntabel agar menjadi penyelenggara layanan informasi publik bidang pelayanan *Health certificate* yang tepat.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/permen-kp/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap (tiga) bulanan (triwulan) atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas/ perguruan tinggi.
7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variable penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.
11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah.
14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari disusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi Balai KIPM Entikong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas mutu kinerja di lingkungan BPPMHKP dalam proses pelayanan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pengguna jasa.

B. Tujuan

Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Balai KIPM Entikong ;
2. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik di Balai KIPM Entikong ;
3. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik Balai KIPM Entikong ;
4. sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
5. Untuk sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik Balai KIPM Entikong ;
6. Untuk mengetahui prioritas perbaikan layanan publik Balai KIPM Entikong .

1.5. Manfaat

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui Survei Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Balai KIPM Entikong;
2. Diketahui kekuatan maupun kelemahan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
5. Munculnya persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan Balai KIPM Entikong.

1.6. Hasil yang Diharapkan

Dengan adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala/periodik diharapkan dapat memberi gambaran tentang hasil capaian kinerja serta permasalahan yang terjadi dalam pelayanan publik khususnya pada pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Melalui hasil survei ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada Balai KIPM Entikong selaku penyelenggara pelayanan publik dimasa yang akan datang.

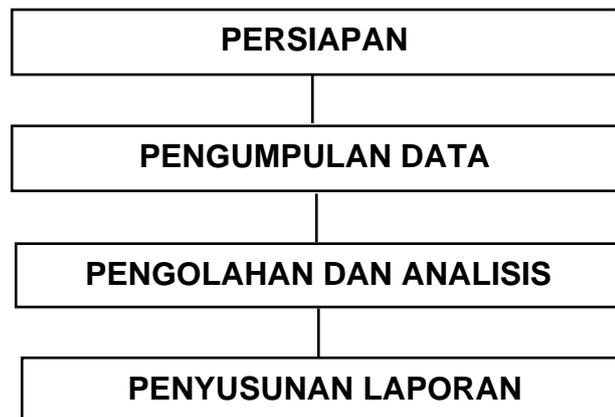
BAB II METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada unit pelayanan Balai KIPM Entikong. Pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II berlangsung pada tanggal April - Juni 2024.

2.2. Tahapan Kegiatan

Tahapan Survei dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

2.2.1. Persiapan

1. Penetapan Pelaksana
 - a. Pembentukan Tim penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dibentuk awal tahun. Kemudian Tim penyusunan SKM memberikan arahan kepada petugas pelayanan untuk memberikan laman pengisian kuesioner kepada pengguna jasa setiap selesai pelayanan.

2. Penyiapan bahan.

a. Kuesioner

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner di laman <https://ptsp.kkp.go.id/skm> sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik.

b. Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I: Identitas responden meliputi Nama, Jenis Usaha, Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan Pekerjaan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

Bagian II: Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan (masyarakat), atas pelayanan yang diberikan petugas. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan pengisian sendiri laman SKM yang mencakup 9 (sembilan) unsur uraian pertanyaan sesuai dengan unsur layanan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan?
4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
6. Bagaimana kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?
7. Bagaimana kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan?
8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?
9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kualitas isi/konten dari aplikasi sistem layanan?

c. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Tabel 1. Bentuk Nilai Jawaban Terhadap Unsur Pelayanan dalam Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	Penilaian			
		Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
1.	Persyaratan	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
2.	Kemudahan Prosedur	Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
3.	Waktu Penyelesaian	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
4.	Kesesuaian Biaya	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
5.	Kesesuaian Produk	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
6.	Kecepatan Respon	Lambat	Kurang Cepat	Cepat	Lambat
7.	Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas	Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
8.	Layanan Konsultasi	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
9.	Kualitas Isi/ Sarana	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik

d. Jumlah Responden

Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada unit pelayanan Balai KIPM Entikong (penerbitan sertifikat Ekspor, Surat Persetujuan Muat serta sertifikasi HACCP). Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama tiga bulan terakhir) mendapat pelayanan pada unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan SKM, responden terpilih minimal 30 responden.

e. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar link kuisisioner <https://ptsp.kkp.go.id/skm> kepada pengguna jasa pada bulan Maret – Juni 2024.

2.2.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disampaikan secara online melalui website atau alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm>. Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan pada periode Triwulan II tahun 2024, yang terdiri dari 42 responden. Responden terdiri Unit Pengolahan Ikan yang melakukan kegiatan ekspor produk perikanan.

2.2.3. Pengolahan dan Analisis Data

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan aplikasi di <https://ptsp.kkp.go.id/skm>. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 14 tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan standar nasional. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

Pengolahan data masing-masing metode SKM dilakukan sebagai berikut:

A. Pengukuran Skala Likert

1. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

B. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei didapat dari rekaman pada aplikasi Susan KKP dan mengunduh data yang telah diinput oleh responden dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.

2.2.4. Penyusunan Laporan

Hasil survei disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPPMHKP dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III
HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Hasil perolehan nilai kepuasan masyarakat dari bulan Maret hingga Juni 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

id survei	No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
71402	1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
71264	2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
71262	3	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
71260	4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
71254	5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
70902	6	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70901	7	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70900	8	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70729	9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70727	10	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70726	11	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70724	12	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70723	13	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
70671	14	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
70602	15	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
70595	16	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00
70585	17	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
68531	18	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
67542	19	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
66694	20	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
65741	21	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
64302	22	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
64138	23	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
64071	24	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
63828	25	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
63758	26	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
63707	27	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
63706	28	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

id survei	No	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
63553	29	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
63169	30	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
62879	31	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
62878	32	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
62490	33	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
62439	34	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00
62324	35	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
62272	36	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
62271	37	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
61995	38	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00
61960	39	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00
61816	40	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
61811	41	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
61809	42	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00

Nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pelaksanaan Survei oleh Balai KIPM Entikong pada Periode Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil nilai rata-rata unsur pelayanan hasil pelaksanaan Survei

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,79
2	Kemudahan Prosedur	3,83
3	Waktu Penyelesaian	3,81
4	Kesesuaian Biaya	3,79
5	Kesesuaian Produk	3,67
6	Kecepatan Respon	3,67
7	Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas	3,76
8	Layanan Konsultasi	3,83
9	Kualitas Isi/ Sarana	3,69

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

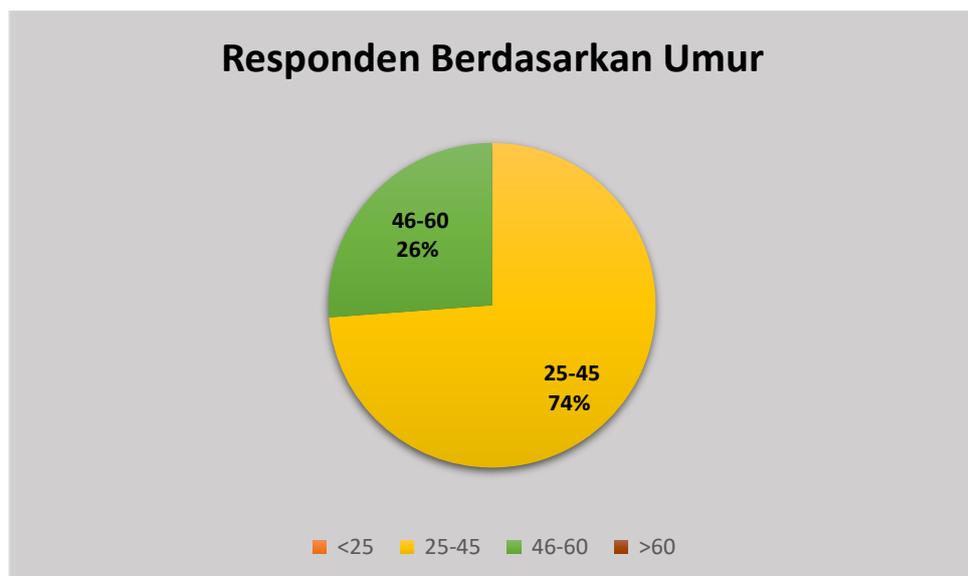
- a. Nilai SKM setelah dikonversi = **93,85**
- b. Mutu pelayanan **A**.
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**.
(Mengacu pada Tabel 2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan)
- d. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

3.2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai KIPM Entikong dibedakan menjadi 3 (Tiga), yaitu karakteristik berdasarkan jenis umur, karakteristik berdasarkan Pendidikan dan Berdasarkan Jenis Kelamin.

3.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Umur

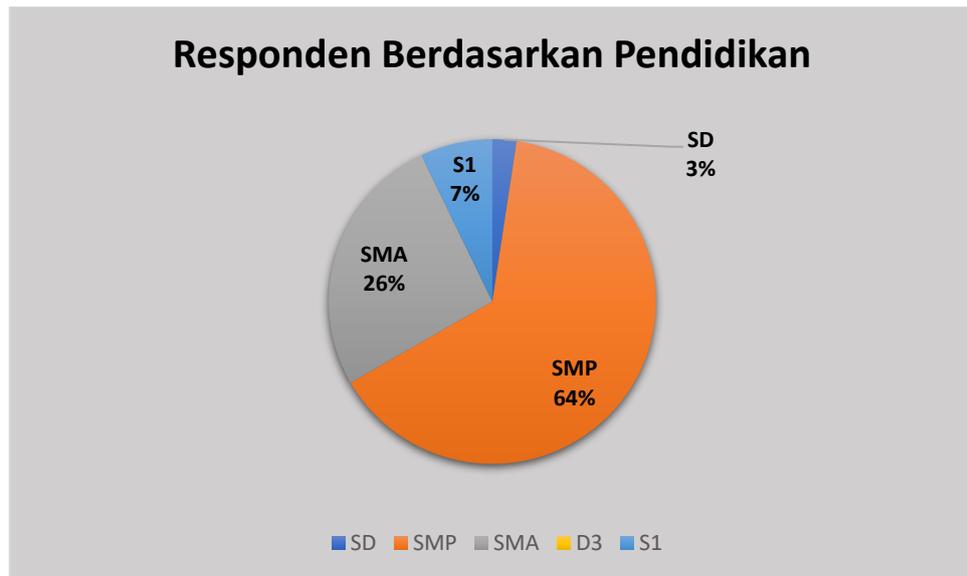
Responden berdasarkan umur dibagi menjadi 4 (Empat) kelompok, yaitu kelompok umur dibawah 25 Tahun, 25 s.d 45 Tahun, 46 s.d 60 Tahun dan lebih dari 60 Tahun. Responden yang melakukan mengisi kuisioner mayoritas dilakukan oleh kelompok umur 25 s.d 45 tahun sebanyak 74% orang, hasil responden tersebut dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2. Grafik Responden Berdasarkan Umur

3.3.2. Responden Berdasarkan Pendidikan

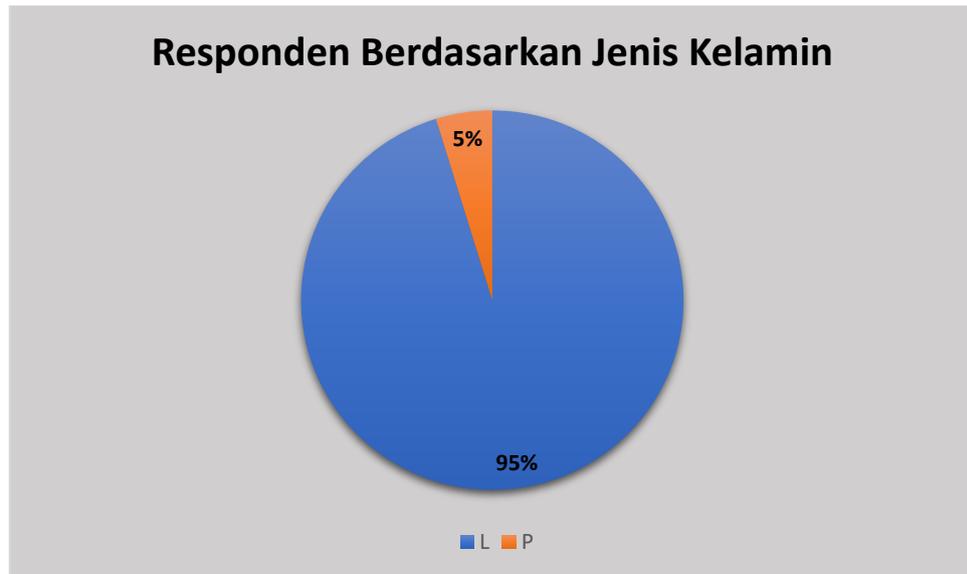
Responden berdasarkan jenis pendidikan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu kelompok SD, SMP, SMA, D3 dan S1. Responden yang melakukan mengisi kuisioner mayoritas dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 27 orang atau sebesar 64%. Hasil responden berdasarkan pendidikan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Grafik Responden Berdasarkan Pendidikan

3.3.3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden berdasarkan jenis kelamin dibagi kedalam dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, dimana bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak responden yang mengisi kuisioner dilihat dari gendernya, yaitu laki-laki dan perempuan. Pengisian kuisioner SKM mayoritas dilakukan oleh laki-laki, yaitu jumlah responden laki-laki sebanyak 95% sedangkan perempuan hanya 5%. Hasil responden tersebut dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

3.4. Saran dan Kritik

Survey kepuasan masyarakat ini juga memberikan ruang bagi responden (pengguna jasa) untuk memberi saran dan kritik guna perbaikan layanan. Artinya, saran dan kritik dapat disampaikan kepada Balai KIPM Entikong sebagai penyedia layanan dan wajib ditindaklanjuti segera guna perbaikan layanan. Adapun kritik dan saran yang masuk pada triwulan II terhadap Balai KIPM Entikong dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Saran dan Kritik Responden

id survei	Kritik Saran
71402	Sangat memuaskan dan kedepanya semakin lebih baik
71264	Sangat baik dan memuaskan
71262	Sangan puas dan baik
71260	Cukup memuaskan. Dan mudahan kedepanya lebih baik lagi
70902	Selalu memberikan pelayanan terbaik nya
70900	Tetap memberikan pelayanan terbaik nya
70729	Kedepan nya lebih baik dari yang sangat baik
70727	Kedepan nya semoga lebih dari yang sangat baik
70724	Kedepan nya semoga lebih, sangat baik
70602	Semoga Lebih baik lagi kedepannya
70595	LEBIH BAIK LAGI

id survei	Kritik Saran
70585	Semoga bermanfaat dan maju terus
68531	baik dan ramah
64071	baik ramah
63828	Tetap jaga dan semangat
63706	Tingkatkan lagi kualitas
62490	baik dan sangat baik
62439	Ramah dan sangat baik
62324	SUDAH SANGAT BAIK
62272	rama dan sangat baik
62271	Tingkatkan lagi ya
61995	sangat ramah baik
61816	Sangat baik dan Semakin di tingkatkan lagi
61809	sangat baik dan ramah

Berdasarkan saran dan kritik yang masuk melalui aplikasi tidak terdapat kritik dan saran yang harus ditindaklanjuti dikarenakan semua kritik dan saran yang masuk bersifat positif.

3.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan II Tahun 2024 lingkup BKIPM Entikong, dapat terlihat hasil survei dari masing-masing unsur pelayanan selama Triwulan II (Periode April- Juni) Tahun 2024 diperoleh total nilai rata-rata dari 9 unsur SKM sebesar 93,85 dengan persepsi mutu layanan SANGAT BAIK karena memperoleh nilai dengan Interval nilai 88,31 –100,00. Nilai SKM Triwulan II Tahun 2024 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya yaitu Triwulan I sebesar 91,76.

Unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur Kemudahan Prosedur (U2), dan Layanan Konsultasi (U8) dengan nilai 3,83. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang tersedia pada kantor pelayanan BKIPM Entikong sudah sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan. Pada unsur Kesesuaian Produk (U5) dan Unsur Kecepatan Respon (U6) dimana memiliki nilai paling rendah yaitu 3,63 hal ini dikarenakan sering hilangnya sinyal baik dari

provider seluler maupun wifi pada kantor Balai KIPM Entikong sehingga ketika terdapat keluhan ataupun pertanyaan dari pengguna jasa petugas tidak langsung dapat merespon.

3.6. Kendala Pengumpulan Data Kuesioner

Secara teknis pengumpulan data kuisiner dilakukan melalui website pada laman yang telah dibagikan ke pengguna jasa Balai KIPM Entikong tetapi terkadang pengguna jasa tidak langsung merespon untuk mengisi kuisiner SKM segera setelah menerima pelayanan dan baru megisi setelah diberi peringatan untuk melakukan pengisian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Secara umum kualitas pelayanan Balai KIPM Entikong dipersepsikan “Sangat Baik” oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh pada triwulan II yaitu dengan nilai mutu pelayanan Balai KIPM Entikong sebesar 93,85 dan nilai ini meningkat dari periode sebelumnya.
2. Unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu 3,83 adalah unsur Kemudahan Prosedur (U2), dan Layanan Konsultasi (U8).
3. Atas pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) triwulan II perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan untuk mendapatkan kualitas pelayanan dengan nilai dengan kategori “Sangat Baik”

5.2. Saran

Diharapkan Balai KIPM Entikong dapat meningkatkan nilai SKM pada triwulan III tahun 2024, terutama untuk Kesesuaian Produk (U5) dan Unsur Kecepatan Respon (U6) dimana memiliki nilai paling rendah yaitu 3,63 sehingga pelayanan di Balai KIPM Entikong dapat terus menjadi lebih baik. Penggunaan provider internet harus di evaluasi karena seringnya hilang sinyal pada wifi kantor sehingga repon petugas menjadi lambat dalam menjawab keluhan ataupun pertanyaan dari pengguna jasa.

id survei	No	Jenis Usaha	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Rating Petugas	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik Saran
70602	15	P	L	25-45	S1	5	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Semoga Lebih baik lagi kedepannya
70595	16	P	L	46-60	SMA	5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	LEBIH BAIK LAGI
70585	17	K	L	25-45	S1	5	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Semoga bermanfaat dan maju terus
68531	18	K	L	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	baik dan ramah
67542	19	K	L	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	baik ramah
66694	20	K	L	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	baik ramah
65741	21	K	L	25-45	SMP	5	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	baik ramah
64302	22	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	baik ramah
64138	23	K	L	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	baik ramah
64071	24	K	P	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	baik ramah
63828	25	K	L	25-45	S1	5	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Tetap jaga dan semangat
63758	26	P	L	46-60	SMA	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
63707	27	K	L	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	baik ramah
63706	28	P	L	46-60	SMP	5	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Tingkatkan lagi kualitas
63553	29	K	L	25-45	SMP	4	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	baik ramah

id survei	No	Jenis Usaha	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Rating Petugas	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Kritik Saran
63169	30	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	baik ramah
62879	31	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	baik dan ramah
62878	32	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	baik dan ramah
62490	33	K	P	25-45	SMP	5	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	baik dan sangat baik
62439	34	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	Ramah dan sangat baik
62324	35	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	SUDAH SANGAT BAIK
62272	36	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	rama dan sangat baik
62271	37	P	L	46-60	SMP	4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Tingkatkan lagi ya
61995	38	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	sangat ramah baik
61960	39	K	L	25-45	SMP	5	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	sangat ramah baik
61816	40	K	L	46-60	SMA	5	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	Sangat baik dan Semakin di tingkatkan lagi
61811	41	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	sangat baik dan ramah
61809	42	K	L	25-45	SMP	5	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	sangat baik dan ramah

Lampiran 2. Aplikasi SUSAN KKP

The screenshot displays the SUSAN KKP application interface. The browser address bar shows the URL `ptsp.kkp.go.id/skm/p/laporan_rekap_upp_v`. The application header includes the logo "Susan KKP" and the user name "Balai KIPM Entikong". The breadcrumb trail is "Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP".

The main content area is titled "Data IKM" and includes filters for "Triwulan 2" and "2024", along with a "Submit" button. Below the filters, a message states: "50 Data terakhir Tw 2/2024, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel". A "Download Data" button is provided for this message.

Below the message, there is a pagination control showing "10 entries per page" and a search input field containing "enti".

A table displays the data for the selected entry:

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai KIPM Entikong	2024	2	4.90	93.85	42

Below the table, it indicates "Showing 1 to 1 of 1 entries". At the bottom of the table area, there is another "Download Data" button.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- Dashboard
- Mapping Data
- Laporan
 - Data Detail
 - Rekap per UPP per Unsur
 - Rekap SKM per Layanan
 - Rekap SKM per UPP
 - Rekap SKM per Eselon
 - Upload Laporan Money
- PAGES
 - Download
 - Profile
 - Logout



BKIPMENTIKONG



BKIPM_Entikong



BKIPM Entikong



kkp.go.id/bkipmentikong



[Cari](#)

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI KIPM ENTIKONG	7	20.57	82.28 %	34.64	86.6 %	25	83.33 %	5	100 %	85.21	TINGGI

Silakan ketik NIP atau Nama F

Cari

Download

#	Nama	Kualifikasi			Kompetensi						Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan
		Tingkat Pendidikan	IP	Prosentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Prosentase	Predikat Kinerja	IP	Prosentase	Hukuman Disiplin	IP	Prosentase		
1	RIWUT EKO TRISMIYARTO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
2	JAWAWI	S-1	21	84 %	15	-	15	0	30	75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	81	TINGGI
3	M. KAREL BAHARUDIN AW.	D-II/D-I/SMA	20	80 %	-	-	22.5	0	22.5	56.25 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	72.5	SEDANG
4	WIDYA NINGSIH	S-2	23	92 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	93	SANGAT TINGGI
5	RAHMAT	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
6	ARIS SUGIARTO	S-1	20	80 %	-	15	15	0	30	75 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	80	SEDANG
7	OKTAVIYANI DYAH RUSTIKAWATI	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAIK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI

SIDAK KKP
 Oktaviyani Dyah
 Rustikawati, S.E.

NEW LHP/PENDING 0 ADMIN PANEL

SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp31,611,831.91

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 09 Jul 2024
Rp31,611,831.91 Prosentase: 100.00%

Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 09 Jul 2024
Rp0.00 0.00%

NOTE:
 Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

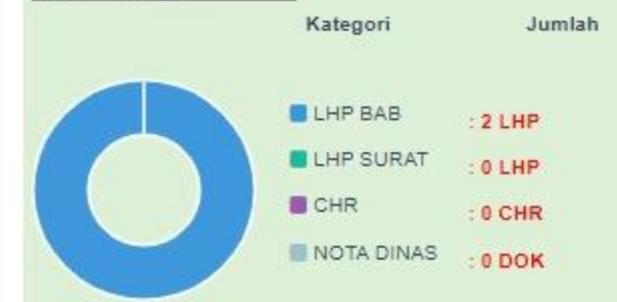
- Daftar LHP
- Change Password
- Logout



STATUS : **IKU Success**

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 2



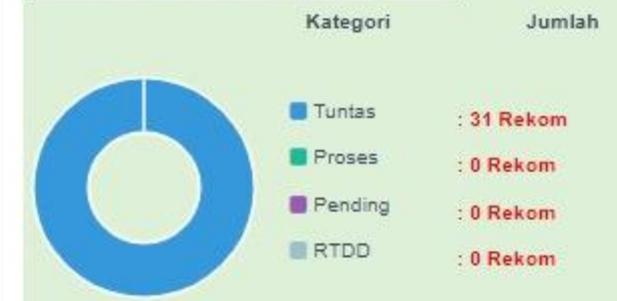
Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 14



Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN : 31



 **SIDAK KKP**
 Oktaviyani Dyah
 Rustikawati, S.E.



NEW LHP/PENDING  **0**  **ADMIN PANEL** 

 **Data Periode:** 01-Jan-2019 s/d 09-Jul-2024 

Jumlah Laporan : 2 Dokumen
 Jumlah Temuan : 14 Temuan
 Jumlah Rekomendasi : 31
 Nilai Keuangan : Rp31,611,832

Tuntas : 31 Rekomendasi
 Proses : 0 Rekomendasi
 Pending : 0 Rekomendasi
 Sisa Nilai Keuangan : Rp0

Search:

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
649568	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG	Audit	4683/ITJ/HP.210/X/2020	2020-10-30	Laporan Hasil Audit Kinerja Balai KIPM Entikong Provinsi Kalimantan Barat TA 2019-2020	TUNTAS	Q Detail
649568	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG	Pemantauan	T.221/ITJ.4/HP.550/IX/2023	2023-09-27	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun 2023 pada Balai KIPM Entikong, di Provinsi Kalimantan Barat	TUNTAS	Q Detail

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous  Next

- PENGAWASAN**
-  BERANDA
-  MANAGE TLHP
-  TUTORIAL



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	167	032	649568	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG	Nilai	100.00	92.77	97.80	0.00	0.00	100.00	85.92	74.95	80%	0.00	93.69
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	19.56	0.00	0.00	10.00	21.48				
					Nilai Aspek	96.39		98.90				85.92				



BALAI KIPM ENTIKONG



BKIPMEntikong



BKIPM_Entikong



BKIPM Entikong



kcp.go.id/bkipmentikong

